

ABSTRAK

Aziz, 2024: Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Dendun Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)
Dosen Pembimbing : Fatahurrazak, SE., Ak., M.Ak., CA dan Ardiansyah, SE., M.Si

Akuntabilitas adalah konsep yang secara luas terkait dengan tanggung jawab, baik bagi individu atau kelompok, terhadap tugas, tindakan, dan hasil kerja mereka. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk dana operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana alokasi dana desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan ketidaksesuaian pembagian ADD untuk kepentingan aparatur desa dengan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidak tahuan aparatur dan Masyarakat mengenai permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Desa Dendun utamanya dan Kecamatan Mantang Umumnya dalam Upaya meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik. Dalam proses perencanaan juga sudah melibatkan Masyarakat. Akan tetapi masih kurang dalam pembagian alokasi 70% dan 30%.

Kata Kunci : Akuntabilitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, ADD.

ABSTRACT

*Aziz, 2024: Accountability Analysis of Village Fund Allocation Management in Efforts to Increase Community Development and Empowerment (Case Study in Dendun Village, Mantang District, Bintan Regency)
Lecturers : Fatahurrazak, SE., Ak., M.Ak., CA and Ardiansyah, SE., M.Si*

Accountability is a concept broadly related to responsibility, either for individuals or groups, for their tasks, actions and work results. Village Fund Allocation (ADD) is the obligation of the Regency/City Government to allocate it into the APBD through balancing funds after deducting the Special Allocation Fund (DAK) to then be distributed to the Village Cash Account (RKD). The use of ADD funds is 30% for Village Government operational funds and 70% for the Village Consultative Body (BPD) for empowerment and strengthening the capacity of village governments. The aim of this research is to describe the accountability of Village Fund Allocation management in empowering village communities. This research was conducted because the implementing team for village fund allocation in carrying out financial administration was not in accordance with applicable regulations due to a mismatch in the distribution of ADD for the benefit of village officials with community development and empowerment. This occurs due to the ignorance of the apparatus and the community regarding Minister of Home Affairs Regulation Number 37 of 2007. It is hoped that this research will be useful for the Dendun Village government, especially and Mantang District in general, in an effort to increase accountability in the management of Village Fund Allocations. The research results show that accountability for planning, administration and accountability has been implemented well. The planning process also involved the community. However, it is still lacking in the distribution of 70% and 30% allocations.

Keywords : *Planning Accountability, Administration, Accountability, ADD.*